

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah Negara China, Negara India menempati urutan kedua di antara negara terpadat di dunia. Populasi India meningkat 181 juta dalam sepuluh tahun terakhir tahun 2011. Dan pada tahun 2011 pula jumlah penduduk India mencapai 1.21.01.93.422 jiwa. (Population, 2011) Negara India juga salah satu negara bagian di Asia Selatan yang rawan konflik, baik itu secara internal maupun eksternal. Dalam politik luar negerinya India menganut doktrin Gujral yang mana menjadikan negaranya mempraktekan politik yang selalu berubah dan berusaha menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangganya (Sandy G. E., 2010).

Sejauh ini India telah menjalin hubungan dengan beberapa Negara bagian di dunia, baik itu Negara kawasan, maupun Negara di luar kawasan Asia Selatan. Pada tahun 1947 setelah tercapainya kemerdekaan dari Britania Raya, perekonomian India sangat berjalan amat lambat. Hal tersebut disebabkan India memilih sebuah sistem perekonomian yang cenderung sulit ditembus oleh pasar dan tertutup. Pemerintahan India pada saat itu menerapkan sistem ekonomi yang tidak pro pasar yang dimana terdapat campur tangan serta kontrol kuat pemerintah dalam setiap kegiatan ekonomi. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya India juga mengandalkan substitusi impor

Tidak hanya itu, hampir 80% penduduk India hidup di pedesaan, di mana sepertiga penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Pada awal kemerdekaan, beberapa faktor kemiskinan di India adalah pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan keterbatasan lahan dan sumber daya modal. Selain itu, tingginya angka buta aksara India dan minimnya infrastruktur untuk mempopulerkan masyarakat India di pedesaan juga menjadi faktor yang mempersulit distribusi barang / jasa dalam konteks ekonomi dan pendidikan. Di satu sisi, pemerintah dituntut untuk segera membuka jalan agar perekonomian dapat berputar dan menikmati kenikmatan yang sama, namun di sisi lain terdapat kendala yang menghambat perputaran roda. (Nehru & Saragih,, 2013)

Mahatma Gandhi dipuji atas advokasi non-kekerasan dan ketekunan moral dalam membantu orang kurang mampu, dan dukungannya terhadap kebijakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa ekonomi India dipisahkan dari industrialisasi negara Barat. Selain kemerdekaan, rakyat India juga membutuhkan kesejahteraan, bagi Gandhi yang dimaksud dengan kemerdekaan tanpa kesejahteraan tidak jauh berbeda dengan India yang masih dikuasai oleh penjajah. Jauh sebelum kemerdekaan, Gandhi terkenal dengan gerakan roda pemintalannya. Gandhi menganjurkan alat-alat produksi tradisional, salah satunya adalah penggunaan alat pemintal kayu, dimana setiap keluarga pasti memiliki mesin pemintal sederhana untuk memproduksi kain, dan meminta kepada masyarakat India untuk berhenti memakai pakaian impor dan menggunakan barang impor lainnya sebagai bentuknya. Hubungan ekonomi antara pemberontakan dan kolonialisme. Namun

hal itu tidaklah cukup untuk mengantarkan masyarakat India dengan jumlah populasinya yang besar untuk keluar dari jurang kemiskinan.

India telah mengubah reformasi ekonomi pada tahun 1947 di bawah Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru (Jawaharlal Nehru) reformasi ekonomi ini meliputi perencanaan dan pengendalian ekonomi versi India. Nehru juga merumuskan rencana lima tahun pada tahun 1951 Pertanian dan irigasi. Meskipun perekonomian India sedang stabil, produksi tanaman dan industrialisasi meningkat, di sisi lain India juga mengalami kelaparan, pengangguran dan kemiskinan. (Nehru & Saragih., 2013). Pada dasarnya, India memiliki visi untuk pembangunan di masa depan. Ajaran Nehru meniru gaya sistem Soviet pada masa Joseph Stalin, dan didukung oleh semangat Mahatma Gandhi dan swasembada membuat pemerintah India merasa tidak perlu mengimpor barang sehingga memisahkan diri Ekonomi internasional. (Meredith , 2008).

Di India sendiri, ada dua sektor ekonomi yang belum mendapat perhatian pemerintah, yaitu industrialisasi dan dunia perfilman Bollywood, dan selebihnya adalah kegiatan ekonomi tak berjiwa yang pada akhirnya menjerumuskan jutaan rakyat India ke dalam kemiskinan dan kelaparan besar-besaran. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1991 membuat masyarakat sadar bahwa India yang saat itu perekonomian domestiknya sangat kritis, tidak memiliki cukup devisa. India benar-benar bangkrut, dan 110 juta orang jatuh miskin dalam dua tahun pertama saja. Inflasi mencapai 17%, melahap pendapatan masyarakat biasa. Pada pertengahan 1991, 330 juta orang atau dua perlima orang India hidup di bawah garis kemiskinan, keuangan pemerintah runtuh, dan India menghadapi krisis. (Meredith , 2008)

India juga membutuhkan kesempatan untuk berintegrasi ke dalam ekonomi Internasional, sehingga pemerintah India memiliki beberapa kerjasama Dengan negara-negara di kawasan Asia salah satunya adalah Negara-negara di Asia Tenggara disebut ASEAN. Kerjasama antara India dan ASEAN sendiri telah terjalin selama bertahun-tahun Pada tahun 1991, dalam rangka meningkatkan partisipasinya di Asia Timur, Sehingga pada tahun 1992, India menjadi mitra dialog sektoral ASEAN Inilah kekuatan geo-politik dan ekonomi masing-masing negara Asia Tenggara yang terdiri dari sepuluh negara anggota Pada bulan Agustus 1967, Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand. Ini diperluas dengan penambahan Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar. Tujuan dibentuknya ASEAN sendiri adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan Budaya di antara negara-negara anggotanya. Juga untuk menjaga perdamaian Dan stabilitas regional, untuk menjadi forum dialog antar negara anggota dengan cara mendiskusikan permasalahan melalui perdamain. ([.aseansec.org.htm](http://aseansec.org.htm), 2021)

Hubungan kerjasama ASEAN - India secara resmi telah terjalin sejak tahun 1992, diawali dengan dialog sektoral pada tahun 1992, yang kemudian mendapat status sebagai mitra wicara penuh pada bulan Desember 1995 dan menjadi anggota ASEAN Regional Forum (ARF) pada tahun 1996. Seiring waktu, India dan ASEAN terus meningkat. Kerja sama yang semakin erat semacam ini Ditandai dengan adanya kerjasama pasar bebas antara ASEAN dan India Melalui Perdagangan Bebas ASEAN-India Perjanjian dimulai pada Oktober 2003 (AIFTA) KTT ASEAN ke-3 dengan kerangka kerja sama perdagangan diadakan di Bali Dalam bentuk

barang, jasa dan investasi, diikuti oleh Departemen kargo, efektif mulai 1 Januari 2010. (Shinoj, 2009)

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, dapat ditarik rumusan masalah “Mengapa India intensif menjalin kerja samanya dengan ASEAN sejak tahun 1991?”

1.3 KERANGKA TEORI

1.3.1 Politik Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan aktualisasi dari politik luar negeri suatu negara yang didalamnya terdapat kepentingan nasional sebagai akumulasi keragaman kepentingan masyarakat. Kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh suatu negara dimaksudkan untuk tercapainya kesejahteraan rakyat negara tersebut. Negara sebagai suatu entitas atau aktor dalam merumuskan kebijakan luar negerinya berdasar pada perubahan yang terjadi di dunia internasional dan juga domestik. Kebijakan luar negeri memerlukan tindakan yang dicerminkan dalam bentuk secara eksplisit menyatakan tujuan, komitmen dan arah, serta digerakkan oleh wakil-wakil pemerintah yang bertindak atas nama komunitasnya yang berdaulat dalam hubungannya dengan dunia internasional (Nazaruddin, 2018)

Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun

kepentingan nasional suatu bangsa ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu. Dalam mencapai kepentingan nasional tersebut, negara-negara maupun aktor dari negara melakukan berbagai macam kerjasama di antaranya adalah kerjasama bilateral, trilateral, regional, dan multilateral. Tujuan nasional yang akan dicapai melalui kebijakan luar negeri merupakan formulasi konkret dan dirancang dengan mengaitkan kepentingan nasional terhadap situasi internasional yang sedang berlangsung serta kekuatan yang dimiliki untuk mencapainya (Anak Agung, 2011).

Menurut Holsti, kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor non-domestik suatu negara yang mempengaruhi negara dalam melakukan dan mengeluarkan kebijakan luar negeri. Faktor eksternal yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri yaitu struktur sistem internasional, kebijakan dari negara lain, masalah global dan regional sektor privat, hukum internasional dan opini publik.

Jack Plano dan Roy Alton dalam *Dictionary of International Relations* mengatakan bahwa politik luar negeri adalah suatu rencana yang dibuat oleh para pengambil keputusan suatu negara untuk negara lain atau entitas internasional untuk mencapai tujuan tertentu dan memuaskan kepentingan nasional dan Strategi atau rangkaian tindakan. (Olton., 1999)

Sementara , Cecil V. Grab Jr. menyatakan: “Politik luar negeri adalah kombinasi dari tujuan suatu negara (kepentingan nasional) dan sarana (kemampuan). Oleh karena itu, ada dua Unsur-unsur tersebut adalah tujuan yang ingin dicapai (tujuan nasional). Oleh karena itu politik luar negeri bertujuan untuk

mencapai tujuan dan cita-cita nasional serta memenuhi kebutuhan suatu negara. Oleh karena itu politik luar negeri merupakan langkah konkrit untuk mewujudkan, melindungi dan mempertahankan kepentingan nasional. Politik luar negeri merupakan pilar yang menghubungkan kepentingan nasional suatu negara. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan, pemerintah harus terlebih dahulu mempertimbangkan kebijakan luar negerinya (Kresna, 2019). Dalam politik luar negeri ini India menggunakan politik luar negeri yang terbuka yaitu berupa *India Look East Policy*.

India's Look East Policy atau yang kita kenal dengan politik luar negeri India dengan "*look east policy*" adalah sebuah kebijakan luar negeri India yang dimulai pada tahun 1991. *Look East Policy* India ini menandai telah dibukanya kran ekonomi untuk mengejar ketertinggalan India dalam hal perekonomian. Perspektif ini pun menandai pergeseran strategis India dari negara dengan ekonomi sosialis menuju ekonomi terbuka yang terintegrasi dengan dunia luar. *Look East Policy* diberlakukan pada masa pemerintahan Narasimha Rao, di tahun 1991.

Kementerian Luar Negeri India sebagai bagian dari Council of Minister atau kabinet pada pemerintahan India, adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk merumuskan arah, dasar, sasaran, serta tujuan dari kebijakan luar negeri India dibawah pengawasan dan persetujuan Perdana Menteri. Sebagaimana dikemukakan diatas, dalam periode pasca-kemerdekaan posisi serta peran Kementerian Luar Negeri berada dibawah intervensi penuh Perdana Menteri sehingga tidak dapat menjalankan peranan signifikan dalam proses perumusan kebijakan luar negeri India. Kondisi ini baru mengalami perubahan pada periode pasca kepemimpinan

Rajiv Gandhi, khususnya pada periode kepemimpinan Perdana Menteri Viswanath Pratap (V.P.) Singh (1989-1990), Chandra Shekhar (1990-1991), dan P.V. Narasimha Rao (1991-1996). Kementerian Luar Negeri pada periode ini mulai diberikan porsi kerja lebih besar dibandingkan pada periode-periode sebelumnya seiring dengan membaiknya infrastruktur birokrasi pada pemerintahan India. Di dalam struktur Kementerian Luar Negeri India terdapat beberapa unit kerja atau divisi berdasarkan pada spesialisasinya masing-masing berdasarkan pada cakupan kawasan atau fungsinya.

Diantara unit atau divisi-divisi tersebut, terdapat dua divisi yang berperan penting dalam proses perumusan kebijakan luar negeri India. Divisi Perencanaan Kebijakan dan Kajian/Penelitian (*The Policy Planning and Research Division*) adalah merupakan divisi yang bertugas untuk melakukan kajian serta memberikan masukan atau rekomendasi tertulis yang mencakup beragam isu dalam kebijakan luar negeri dan peranan internasional India sebagai rekomendasi kebijakan pada pembuat kebijakan dan aparatur Kementerian Luar Negeri India lainnya. Divisi lainnya adalah Divisi Ekonomi (*Economic Division*) yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri India pasca-reformasi sistem ekonomi domestik pada tahun 1991. Sebagaimana akan dibahas pada bagian-bagian berikut, reformasi ekonomi tahun 1991 turut berpengaruh dalam mengubah persepsi serta peran internasional India dalam sektor ekonomi internasional. Selain Kementerian Luar Negeri, departemen-departemen lain yang terdapat dalam Council of Minister juga dapat berperan dalam perumusan kebijakan luar negeri. Departemen Pertahanan, Departemen Perdagangan, serta Departemen Keuangan

adalah bagian dari Council of Minister yang, secara langsung maupun tidak, dapat memberikan input dalam proses perumusan kebijakan luar negeri India.

1.4 METODE PENELITIAN

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Menurut kutipan dari Bagong Suyanto dan Sutinah (2006), Taylor dan Bogdan (1984) dapat memaknai penelitian kualitatif sebagai hasil penelitian deskriptif tentang kata-kata lisan dan tertulis serta perilaku manusia yang dapat diamati. Sementara itu, menurut penelitian Strauss dan Corbin (2003), metode kualitatif mencoba menemukan realitas empiris realitas sosial agar dapat lebih memahami realitas sosial. Menurut penulis metode ini akan membantu penulis menjelaskan pengaruh *Look East Policy* dan hubungan India dengan ASEAN untuk mengurangi hambatan- hambatan dalam perdagangan Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1.4.1 Metode Pengumpulan Data

Pada saat penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data untuk mencari masalah yang sesuai dengan rumusan masalah yang ada dan mencari informasi detail tentang pengaruh *Look East Policy* dan hubungan India dengan ASEAN untuk mengurangi hambatan- hambatan dalam perdagangan. Dalam pengumpulan data, penulis melakukan penelitian dengan mencari informasi berkelanjutan dalam beberapa bentuk melalui media, internet, buku, surat kabar, jurnal, dan lain- lain.

1.4.2 Metode Analisa Data

Selain mengumpulkan data, penulis akan menganalisis informasi yang telah diperoleh, kemudian dijadikannya jawaban rumusan masalah tersebut. Namun perlu diperhatikan bahwa penulis tetap berpedoman pada teori yang digunakan.

1.5 HIPOTESA

Berdasarkan teori yang digunakan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan diatas. Maka dapat ditarik hipotesis bahwa :

India secara intensif melakukan kerja sama dengan ASEAN sejak tahun 1991 karena dipengaruhi oleh :

1. Perubahan orientasi kebijakan luar negeri melalui *look east policy*
2. Adanya kepentingan nasional untuk meningkatkan ekonomi dalam negeri India.

1.6 JANGKAUAN PENELITIAN

Pertama, penelitian ini mengambil unit perspektif Untuk memudahkan penulis dalam mengkaji dan menulis topik penelitian ini mengenai *Look East Policy* dan *ASEAN-Free Trade Agreement* dari tahun 1991 sampai 2012.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Bab ini akan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangkakonseptual, metodologi penelitian, Hipotesa,

jangkauan penelitian ,tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. Bab I ini menggambarkan mengenai penelitian yang akan Dilakukan.

BAB II : . Bab ini akan membahas tentang ekonomi Negara India untuk membentuk Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-India ketika menganalisis dan meneliti isu-isu. Selain itu, dalam menganalisis kerjasama ekonomi melalui pasar bebas juga dibahas bagaimana kebijakan *Look East Policy* India menjadi lahirnya Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-India.

BAB III: Bab ini merupakan sebagai bab penutup dari penelitian ini, ini berisikan beberapa kesimpulan terkait hasil penelitian yang telah dilakukan.